

EXPERT

Jurnal Sistem Informasi



**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (DECISION SUPPORT SYSTEM)
PENILAIAN KEDISIPLINAN SISWA MENGGUNAKAN METODE TOPSIS
(STUDI KASUS: SMK MA'ARIF SUKOHARJO)**

Rina Wati, Suyono

**METODE AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA**

Yuthsi Aprilinda, Ayu Kartika Puspa

**METODE TOPSIS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENENTUAN PENERIMAAN BEASISWA DI STMIK PRINGSEWU**

Riki Renaldo, Elisabet Yunaeti Anggraeni, Elieser Rudi HC

**METODE ANALITICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM
PENENTUAN LOKASI HOME INDUSTRI DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Tri Susilowati, M. Faruk Hidayatulloh

**SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA AYAM BROILER DENGAN
METODE FORWARD CHAINING**

Fenty Ariani, Marpitalia, Erlangga, Yulfriwini

**PENERAPAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHT) DALAM
PENENTUAN KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS FIF GROUP)**

Sushanty Salch, Dona Yulawati

ISSN : 2088-5555

Write To Be Experts

JUDUL	HAL
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (DECISION SUPPORT SYSTEM) PENILAIAN KEDISIPLINAN SISWA MENGGUNAKAN METODE TOPSIS (STUDI KASUS: SMK MA'ARIF SUKOHARJO)	1 - 7
METODE AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA	8 - 12
METODE TOPSIS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMAAN BEASISWA DI STMIK PRINGSEWU	14 - 18
METODE <i>ANALITICAL HIERARCHY PROCESS</i> (AHP) DALAM PENENTUAN LOKASI HOME INDUSTRI DI KABUPATEN PRINGSEWU	19 - 26
SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA AYAM BROILER DENGAN METODE FORWARD CHAINING	27 - 32
PENERAPAN METODE SAW (<i>SIMPLE ADDITIVE WEIGHT</i>) DALAM PENENTUAN KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS FIF GROUP)	33- 42

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Bandar Lampung

JMSIT	Volume 09	Nomor 01	Lampung, Juni 2019	ISSN 2088-5555
-------	-----------	----------	--------------------	----------------

TIM PENYUNTING

Penanggung Jawab

Ahmad Cucus, S.Kom., M.Kom.

Ketua Tim Redaksi:

Taqwan Thamrin, ST, M.Sc.

Penyunting Ahli (Mitra Bestari):

Mustofa Usman, Ph.D (Universitas Lampung)

Dra. Wamiliana, MA., Ph.D (Universitas Lampung)

Iing Lukman, M.Sc., Ph. D (Universitas Malahayati)

Penyunting:

Fenty Ariani, S.Kom, M.Kom

Robby Yuli Endra, S.Kom.,M.Kom

Ayu Kartika Puspa, S.Kom, M.TI

Erlangga, S.Kom, M.Kom

Wiwin Susanty, S.Kom.,M.Kom

Pelaksana Teknis:

Wingky Kusuma, S.Kom

Alamat Penerbit/Redaksi:

Pusat Studi Teknologi Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Bandar Lampung

Gedung M Lt.2

Jl. ZA Pagar Alam No.89, Gedong Meneng, Rajabasa

Bandar Lampung

e-mail: jurnalfik@ubl.ac.id

METODE AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yuthsi Aprilinda^{#1}, Ayu Kartika Puspa^{*2}

Prodi Sistem Informasi Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A. Pagar Alam no 26, Labuhan Ratu – Bandar Lampung

¹yuthsi.aprilinda@ubl.ac.id

²ayukartikapuspa@ubl.ac.id

ABSTRAK

Menghadapi industri 4.0 di Indonesia banyak perusahaan yang mempersiapkan diri untuk transformasi digital dengan melakukan investasi dan inovasi pada sisi teknologi informasi, tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investasi yang banyak tentu mendorong adanya audit pada tata kelola TI pada BUMN. Audit pada sektor publik dalam hal ini adalah BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat, karena BUMN memiliki karakteristik untuk patuh pada kebijakan serta ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis metode audit tata kelola teknologi informasi yang telah dilakukan oleh BUMN di Indonesia dan hasil yang didapatkan, dengan harapan dapat menemukan metode audit tata kelola teknologi informasi dengan praktik terbaik (*best practice*) sebagai salah satu acuan auditor pemerintah dalam mengevaluasi investasi TI di BUMN.

Kata Kunci : Audit, Tata Kelola TI, BUMN

1. Pendahuluan

Menghadapi industri 4.0 di Indonesia banyak perusahaan yang mempersiapkan diri untuk transformasi digital dengan melakukan investasi dan inovasi pada sisi teknologi informasi, tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak dapat dipungkiri bahwa sinergi teknologi informasi dibutuhkan untuk menyederhanakan sistem TI dan berkomunikasi agar lebih mudah dikelola dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi, mampu menjawab kebutuhan bisnis serta mampu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dalam usahanya untuk memberikan nilai tambah, BUMN membangun banyak platform digital dan penerapan *Internet of Things* (IoT).

Sudah lumrah jika belanja TI selalu menghabiskan dana yang besar, menurut *International Data Corporation* (IDC) Indonesia memperkirakan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia mencapai Rp 443 triliun pada tahun 2018 dimana 70% dari dana tersebut dibelanjakan untuk *hardware* namun diprediksikan pada tahun-tahun mendatang akan mengarah kearah teknologi berbasis layanan seperti *cloud*, *platform* dan aplikasi.

Investasi yang banyak tentu membutuhkan tata kelola TI yang baik yang ditentukan oleh keselarasan strategi bisnis dan strategi IT. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan panduan Tata Kelola TIK Nasional sebagai panduan umum dan dasar legalitas bagi seluruh instansi pemerintah di Departemen atau

LPND di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Permen Kominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO /11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Kemudian pada tahun 2011 pemerintah memperkuat panduan tersebut dengan menerbitkan Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik yang disusun oleh Tim Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selain panduan tersebut, berbagai perusahaan di Indonesia juga menggunakan berbagai model *best practices* untuk tata kelola TI seperti : COBIT, COSO, CMMI, ITIL, ISO/IEC 27002 dll.

Jumlah belanja TI yang tinggi mendorong adanya audit pada tata kelola TI pada BUMN seperti tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2013 bahwa audit tata kelola teknologi informasi ditetapkan dalam jangka waktu setiap triwulan atau setiap 1 tahun yang diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). (Aprilinda, 2018) Audit bertujuan khusus untuk memeriksa pengelolaan seluruh sumber daya TI (termasuk didalamnya manajemen organisasi dan pimpinan), apakah dapat mendukung dan sejalan dengan strategi bisnis (setiawan, 2013). Audit pada sektor publik dalam hal ini adalah BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat, karena BUMN memiliki karakteristik untuk patuh pada kebijakan serta ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis metode audit tata kelola teknologi informasi yang telah dilakukan oleh BUMN di Indonesia dan hasil

yang didapatkan, dengan harapan dapat menemukan metode audit tata kelola teknologi informasi dengan praktik terbaik (*best practice*) sebagai salah satu acuan auditor pemerintah dalam mengevaluasi investasi TI di BUMN.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah adalah sebagai berikut: Dengan karakteristik khusus yang dimiliki BUMN yaitu untuk patuh pada kebijakan serta ketentuan perundang-undangan, penerapan audit tata kelola TI seperti apa yang dinilai paling optimal.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

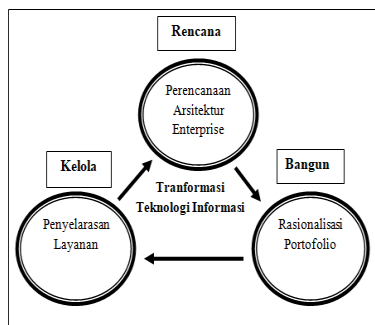
Adapun tujuan dari penelitian ini yang dapat dicapai : menganalisis metode audit tata kelola teknologi informasi dengan praktik terbaik (*best practice*) sebagai salah satu acuan auditor pemerintah dalam mengevaluasi investasi TI di BUMN

2. Landasan teori

2.1. Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola teknologi informasi adalah upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu *enterprise* yang dilakukan oleh dewan redaksi, manajemen eksekutif, dan juga oleh manajemen teknologi informasi. (Surendro, 2009)

Agar dapat menempatkan struktur tata kelola teknologi informasi, proses dan mekanisme terkait dalam hubungan yang komprehensif diantara mereka, berikut dikemukakan kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. Kerangka kerja teknologi informasi dapat digambarkan seperti gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi

Kerangka kerja tersebut terdiri dari tiga komponen utama yang mendukung suatu siklus

hidup berupa rencana – bangun – kelola, dan memungkinkan tranformasi teknologi informasi melalui umpan balik berkelanjutan melalui ketiga komponen tersebut. Ketiga pilar tersebut adalah :

- a. Perencanaan Arsitektur *Enterprise*, yang berfokus terhadap :
 - 1) Pemodelan arsitektur *enterprise* dan manajemen
 - 2) Perencanaan teknologi informasi strategis dan arah pengembangannya
 - 3) Manajemen standar
- b. Rasionalisasi Portofolio, yang berfokus pada :
 - 1) Rasionalisasi aplikasi dan infrastruktur
 - 2) Analisis proyek dan portofolio
 - 3) Meger dan integrasi
- c. Penyelaras Layanan, yang focus pada :
 - 1) Manajemen penyampain layanan
 - 2) Manajemen hubungan bisnis
 - 3) Manajemen keuangan teknologi informasi
 - 4) Kepatuhan terhadap aturan
 - 5) Perencanaan bisnis berkelanjutan.

Implementasi tata kelola informasi terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, memperkirakan solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengoperasikan solusi (surendro, 2009)

2.2. Audit Sistem Informasi

Audit Sistem Informasi (SI)/TI adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset, teknologi informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Gondodoyoto (2007) menjelaskan bahwa pada hakekatnya, audit sistem informasi sebagai audit tersendiri dan bukan merupakan bagian dari audit laporan keuangan, perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi (*IT governance*). Tingkat kesiapan (*level of maturity*) dapat dilihat dari tata kelola informasi, tingkat kepedulian seluruh stakeholders tentang posisi sekarang dan arah yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga perencanaan Teknologi Informasi hendaknya dilakukan tidak dengan asal-asalan.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan sumber data sekunder. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Tata kelola TI pada pemerintah

Suatu tata kelola adalah bagaimana mengubah kebiasaan dalam pengambilan keputusan oleh karena itu pengambilan keputusan harus mengacu kepada prinsip-prinsip dari tata kelola TI diantaranya:

1. Citra yang bersih.
 - a. Organisasi yang bersih.
 - b. Kebijakan yang jelas dan standar.
 - c. Komunikasi yang kuat.
 - d. Strategi yang jelas.
2. Pemeriksaan secara *independent* dan peningkatan yang berkelanjutan.
3. Proactive melakukan perubahan manajemen jika manajemen tidak berjalan dengan baik.
4. Bertanggung jawab dan penanganan bisnis operasi yang bersih.
 - a. Organisasi yang terpercaya.
 - b. Efektif dalam penggunaan TI.
 - c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset.
5. Proses yang akurat.

4.2. Mengapa tata kelola TI perlu bagi pemerintah

Menurut hasil penelitian Weill & Ross (2004), terdapat lima kunci keputusan tata kelola TI sehingga teknologi informasi adalah sebuah aset yang strategis sebagai berikut:

1. *IT principles* menjelaskan pernyataan-pernyataan eksekutif tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan organisasi dan kemana arah TI akan dijalankan, prinsip TI menjadi bagian penting dari manajemen organisasi, yang terus didiskusikan dan dilaksanakan demi perbaikan organisasi, baik di sektor pemasaran, keuangan, pabrik dan lain-lain.
2. *IT architecture decisions*. Arsitektur TI adalah pengorganisasian logika dari data, aplikasi dan infrastruktur yang dikemas dalam suatu kebijakan, hubungan dan pemilihan teknologi untuk mendapatkan integrasi dan standardisasi teknis dan

bisnis yang diharapkan. Selain itu teknologi sebagai pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan melalui *IT principle*, selanjutnya memerlukan proses standardisasi dan integrasi di dalam suatu organisasi. Dalam banyak kasus di Indonesia saat ini banyak persoalan masalah integrasi dan koordinasi, kepentingan sektoral masih menjadi problem, sehingga sering gagalnya proyek IT di perusahaan yang menghabiskan banyak biaya.

3. *IT infrastructure*. Prasarana dan sarana teknologi informasi yang menyangkut jaringan, komputer, perangkat keras dan lunak lainnya adalah suatu kumpulan komponen yang diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi (data, informasi, gambar, video, teks) dalam waktu yang singkat dan proses penyimpanan yang efektif. Suatu sarana yang bisa dikontrol dari pusat kekuasaan dan yang dipakai bersama menjadi hal yang penting. Perencanaan kapasitas, baik di penyimpanan, pengiriman maupun pelayanan menjadi penting. Tanpa ada perencanaan yang baik, maka akan menyebabkan buruknya citra dan kinerja TI di perusahaan.
4. *Business applications needs*. Dalam pengembangan teknologi informasi keperluan bisnis yang spesifik sehingga kehadiran teknologi informasi memberikan suatu nilai baru bagi organisasi. Dua hal penting dalam identifikasi keperluan bisnis yang terkait dengan teknologi informasi yaitu kreatifitas dan disiplin. Kreativitas diperlukan untuk mengidentifikasi suatu cara atau proses baru dari perusahaan/organisasi sehingga ada nilai yang bermakna. Sedangkan disiplin menyangkut hal yang berkaitan dengan integritas arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai dengan arsitektur perusahaan yang terintegrasi.
5. *IT investment and prioritization*. Investasi teknologi informasi sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top manajemen dari suatu organisasi, hal ini di karenakan nilai yang ada tidak langsung terasa oleh organisasi. Berbeda jika kita membeli mobil baru manfaatnya tentu langsung terasa. Oleh karena itu pemahaman eksekutif maupun komisaris menjadi penting. Berapa biaya yang dikeluarkan? Untuk apa dan bagaimana

berkoordinasi dari berbagai kepentingan dan keinginan dari sektor lain.

Kelima dasar yang dikembangkan oleh Weill & Ross (2004) ini sangat penting dipahami oleh petinggi-petinggi organisasi agar dapat menjadi bagian dari *good corporate governance*

4.3. Good Public Governance

Istilah *good public governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau pun administrasi negara yang baik. Istilah tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

4.4. Analisa model tata kelola TI

Dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini bahwa model COBIT, Weill & Ross, ITGI, dan Peterson memang suatu model tata kelola TI pada aspek proses pembuatan keputusan dan lebih menitik-beratkan pada pengambilan keputusan

untuk bisnis sistem dalam artian keseluruhan proses bisnis, sedangkan COBIT lebih menitik-beratkan pada bagaimana melakukannya

Peterson	Weill & Ross	ITGI	AS 8015	COBIT
Pengaturan yang bersifat top level	Sudut pandang dalam pengambilan keputusan	Fokus area dari Tata kelola TI	Mengacu pada konsep GCG	One size fit all
Fenakam pada struktur organisasi, mekanisme hubungan dan proses investasinya secara keseluruhan termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasinya	Konsep what, who dan how dalam pengambilan keputusan	Orientasi pada proses-proses yang harus dilakukan dalam penerapan Tata kelola TI	Pengaturan yang bersifat top level	Konsep why, who dan what dalam pengambilan keputusan
Mekanisme hubungan merupakan faktor keselarasan antara TI-Bisnis	Pengaturan yang bersifat top level	Adanya strategi untuk mencapai keselarasan antara TI-Bisnis	Proses lebih ditekankan pada aspek monitor evaluate dan direct berdasarkan keinginan bisnis dan sekawan dari bisnis	Kuat dalam checklist jika mengaudit
Berorientasi pada pengambilan keputusan secara keseluruhan	Berorientasi pada pengambilan keputusan secara spesifik	Bersifat praktis	Adanya siklus antara TI-Bisnis untuk dari bisnis menggunakan proposal sampai dengan proyek dihasilkan dan pengukuran kinerja TI merupakan keselarasan antara TI-Bisnis	Sudut pandang kontrol dan pelaksanaan kontrol pada tingkat manajemen
Cocok untuk pengaturan atau pembentukan (setting up) Tata kelola TI (top-down)	Pendekatan komunikasi merupakan faktor keselarasan antara TI-Bisnis		Bersifat praktis	Berorientasi pada action
Bersifat teoritis	Domain berupa bidang-bidang keputusan TI yang sifatnya fundamental			Domain berupa bidang dalam siklus manajemen umum
	Cocok untuk pengaturan atau pembentukan (setting up) Tata kelola TI (top-down)			Cocok untuk monitoring proses TI untuk membantu tercapainya pelaksanaan Tata kelola TI yang baik
	Bersifat teoritis			Bersifat praktis

Gambar 2. Analisa model tata kelola TI

Berdasarkan karakteristik setiap model ada dua model yang dapat menjadi model untuk BUMN yaitu AS 8015 dan COBIT. AS 8015 mengacu pada GCG sesuai dengan target BUMN dan memiliki pengaturan yang bersifat top level, sementara itu peraturan dan pedoman tata kelola TI yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengacu pada COBIT.

Standar AS 8015 ini sangat singkat, dapat diimplementasikan di semua jenis organisasi yang ada di Australia, mencakup perusahaan terbuka/pribadi, instansi pemerintahan, dan organisasi nirlaba. Tetapi untuk dapat dikatakan sebagai model tata kelola TI, AS 8015-2005 terlalu sempit karena lebih diposisikan sebagai kontrol Model yang dapat digunakan berbagai kalangan. Atas dasar pertimbangan itu maka COBIT dapat menjadi kandidat yang lebih baik, selain karena telah selaras dengan pedoman tata kelola TI yang dikeluarkan oleh pemerintah COBIT juga menyediakan proses-proses penting tata kelola TI yang dibagi dalam keempat domainnya. COBIT memberikan deskripsi control objective atas setiap proses, dari ke-34 proses yang dimilikinya; dilengkapi pula dengan CSF, KPI, KGI, maturity level untuk setiap prosesnya. COBIT paling mendekati prinsip-prinsip model tata kelola TI. COBIT 4.0 memberikan konteks bisnis yang lebih kuat dibandingkan dengan COBIT 3.0 keterkaitan antar proses dan bagaimana dinamika peran untuk setiap proses berhasil didefinisikan walaupun masih sangat high level.

Merujuk pada persyaratan tata kelola TI yang efektif menurut Weill & Ross COBIT lebih cenderung ke bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat dan dimonitor. Karena berorientasi pada proses, keputusan yang dibuat dalam manajemen dan penggunaan TI juga selalu bereferensi kepada proses.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan karakteristik model tata kelola TI dan mempertimbangkan karakteristik BUMN dan pedoman yang telah diterbitkan oleh pemerintah COBIT adalah model yang tepat untuk audit tata kelola TI karena Merujuk pada persyaratan tata kelola TI yang efektif menurut Weill & Ross COBIT lebih cenderung ke bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat dan dimonitor. Karena berorientasi pada proses, keputusan yang dibuat dalam manajemen dan penggunaan TI juga selalu bereferensi kepada proses.

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian dan analisa lebih lanjut dengan data yang lebih akurat dan observasi yang lebih mendalam serta model yang lebih beragam.

Daftar Pustaka

- [1]. Aprilinda. Y, Puspa. AK . 2018. Pemetaan COBIT 4.1 untuk penilaian kematangan tata kelola TI, Jurnal EXPERT vol 8 no 1, UBL Press, Bandar Lampung.
- [2]. Gondodiyonto. 2007. “Kerangka Kerja COBIT”.
- [3]. Setiawan. H, Mustofa. K. 2013. Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia, Jurnal IPTEK-KOM Vol.15 No.1.
- [4]. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- [5]. Surendro, K. 2009. “Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi”, Bandung : Informatika
- [6]. Weill, P., Ross, J. 2004. IT Governance in One Page. CISR Working Paper num. 349.
- [7]. <http://www.idc.co.id> diakses pada 11 Juni 2019

Redaksi :
Pusat Studi Teknologi Informasi (PSTI).
Gedung Business Center Lt 2
Jl. Zainal Abidin No. 26 Bandar Lampung
Telp. 0721 - 774626
SistemInformasi@ubl.ac.id



9 772088 555000